

**PERAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENYUKSESKAN  
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XVIII TAHUN 2012**

**Oleh :**

**Dimas Putra Fauzi**

**Dosen Pembimbing: Drs. Erman, M.Si**

**Bck.dimas@yahoo.co.id**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

National Sports Week (PON) is a national multi-sport event held 4 (four) years, and is the culmination of sports activities in order to increase and development of national sports achievements. Besides, PON act as a coaching outcome evaluation conducted by the Indonesian National Sports Committee (KONI) together Province Provincial Board (Pengprov) sports, KONI Regency / City and all of the components in each area. Where in 2011 the province of Riau to host PON XVIII, which became the center of Pekanbaru City of PON. The government's role in the success of Pekanbaru City National Sports Week XVIII of course highly charged. The purpose of this study was to determine the role of government in ensuring the success of Pekanbaru City National Sports Week XVIII and to know what are the factors that affect not optimal. This study uses qualitative research methods to include an assessment of descriptive file. Intake of informants in this study was purposive sampling namely retrieval techniques with particular data source, specific consideration is the person who is considered the most out of what we expect or as a ruler that will allow researchers to explore the object / social situation under study.

Based on the research that has been done is used the theory of policy and policy evaluation. Researchers concluded Pekanbaru city government's role in the success of the National Games of the XVIII is not going well. Still there are constraints faced by the City of Pekanbaru is a problem related to the ability of local government officials, Public awareness is still lacking in the success of the National Sports Week XVIII

Keywords: policy evaluation, the National Sports Week XVIII

## A. Pendahuluan

Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah multi even olahraga nasional yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali, dan merupakan titik kulminasi kegiatan keolahragaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional. Disamping itu, PON dijadikan sebagai ajang evaluasi hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi bersama-sama Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga, KONI Kabupaten/Kota serta semua komponen di setiap daerah.

PON pertama dilaksanakan di kota Solo pada tanggal 8 – 12 September 1948 dijadikan sebagai sarana pemersatu bangsa melalui kegiatan olahraga. Sebagai sarana pemersatu bangsa yang merupakan salah satu tujuan pokok penyelenggaraan PON tersebut harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka lebih meningkatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejalan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan penyelenggaraan PON juga diharapkan untuk dapat menjaring bibit atlet potensial, yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan menuju prestasi yang lebih tinggi.

Dengan penyelenggaraan PON secara bergilir, akan tercipta dan terbentuk pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan, serta sektor lain yang pada gilirannya dapat mendorong percepatan peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional dan sekaligus memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Terpanggil atas peran, fungsi serta dampak positif penyelenggaraan PON dalam memajukan dan mengembangkan potensi daerah, KONI Provinsi Riau

bersama Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah mengajukan usulan sebagai calon tuan rumah penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012. Selain Provinsi Riau terdapat 2 (dua) provinsi lain yang mencalonkan diri kepada KONI. Melalui forum Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) yang diadakan khusus untuk memilih calon tuan rumah pada tanggal 12 Agustus 2006, Provinsi Riau terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara PON XVIII Tahun 2012, dan Kota Pekanbaru menjadi Sub Panitia Besar PON XVIII

Pekan Olahraga Nasional XVII Tahun 2012 Provinsi Riau dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari. Upacara pembukaan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 dan penutupan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012. Penetapan Kota Pekanbaru sebagai tempat penyelenggara PON XVII adalah berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0039 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Riau Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012;
2. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: 0383 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: 0072 Tahun 2010 Tentang Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012;
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan

- Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau;
4. Keputusan Ketua Umum KONI Nomor: 55 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pekan Olahraga Nasional;
  5. Keputusan Ketua Umum KONI Nomor: 73 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau;
  6. Keputusan Ketua Umum KONI Nomor: 66 Tahun 2009 Tentang Tim Pengarah dan Pengawas Panitia Besar PON XVIII/2012 Riau;
  7. Keputusan Ketua Umum KONI Nomor: 35 Tahun 2011 Tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau
  8. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor 04/MUSORNASLUB/2006 tentang penunjukan tuan rumah PON XVIII Tahun 2012
  9. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Peraturan PON, menunjuk Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana

Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau menyebutkan bahwa Penganggaran Alokasi Dana lainnya untuk kegiatan pembangunan venues yang baru dimulai dari tahun 2008;

Waktu pelaksanaan pertandingan cabang olahraga secara umum dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari yang dimulai pada tanggal 9 September 2012 hingga selesai pada tanggal 20 September 2012. Namun, apabila diperlukan dan untuk memenuhi kebutuhan teknis pertandingan, beberapa cabang olahraga dapat dilaksanakan lebih awal sebelum hari H pembukaan PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau.

PB PON XVIII tahun 2012 hanya dibentuk dalam waktu sementara saja, yaitu selama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tahun 2012. Seluruh kegiatan yang berkaitan mengenai Pekan Olahraga Nasional XVIII menjadi suatu tanggung jawab sepenuhnya oleh PB PON XVIII tahun 2012. PB PON XVIII tahun 2012 adalah pihak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara dan Pemuda Olahraga Nomor 0471 tahun 2011 untuk menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau mengharuskan pemerintah kota Pekanbaru untuk bekerja keras dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan PON ke-18 ini, selain itu fungsi pemerintah Kota Pekanbaru sebagai Sub Panitia Besar PB PON XVIII tahun 2012 Kabupaten dan Kota. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selaku tuan rumah dalam upaya menyukseskan PON-18 Tahun 2012 di Pekanbaru.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau mengharuskan pemerintah kota Pekanbaru untuk bekerja keras dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan PON ke-18 ini, selain itu fungsi pemerintah kota Pekanbaru sebagai Sub Panitia Besar Kabupaten dan Kota. Maka dari itu berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selaku tuan rumah dalam upaya menyukseskan PON-18 Tahun 2012 di Pekanbaru, diantaranya:

1. Mempersiapkan infrastruktur untuk mensukseskan PON Ke-18
2. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kota Pekanbaru selama berlangsungnya PON Ke-18 salah satunya penertiban Pedagang Kaki Lima
3. Menghimbau perusahaan, toko dan kantor pemerintahan di kota Pekanbaru untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PON ke-18

Pelaksanaan PON Ke-18 Tahun 2012 yang diselenggarakan di kota Pekanbaru merupakan program kerja Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dalam hal Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional (KONI). Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau mengharuskan pemerintah kota Pekanbaru untuk bekerja keras dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan PON ke-18 ini, selain itu fungsi pemerintah kota Pekanbaru sebagai Sub Panitia Besar Kabupaten dan Kota. Namun program yang dirancang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dalam

pelaksanaanya banyak yang belum terwujud dengan baik.

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah kota Pekanbaru dalam menyukseskan PON Tahun 2012?
2. Apakah faktor-faktor penghambat peran pemerintah kota Pekanbaru dalam menyukseskan PON Ke-18 Tahun 2012?

## **C.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah kota Pekanbaru menyukseskan PON Tahun 2012
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran pemerintah kota Pekanbaru dalam menyukseskan Tahun 2012

## **D.Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat akademis**

- a. Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam konsep mengenai evaluasi program kerja pemerintahan Bagaimana peran pemerintah kota Pekanbaru dalam menyukseskan PON Tahun 2012.
- b. Menjadi masukan bagi pelaksanaan program kerja pemerintah kota Pekanbaru dalam menyukseskan PON Tahun 2012.

- c. Dapat digunakan untuk pengembangan dalam upaya meningkatkan peranan pemerintahan kota Pekanbaru dalam menyukseskan PON Tahun 2012.

- d. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang menyukseskan pekan olahraga nasional

## E. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan yang bertujuan untuk memberikan jawaban yang sistematis tentang suatu fenomena yang akan diteliti.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana menjadikan alasan bagi peneliti untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dan berhubungan didalam penelitian ini. Diantaranya :

### 1. Pengawasan

Banyak pendapat para ahli tentang pengawasan, pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. (*Inu Kencana Sfaifi, 1998.h 59*). Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran

kekurangan, pemborosan, pembubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang.

Menurut Prof. Sondang Siagian mendefinisikan bahwa Pengawasan adalah proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun tujuan dari pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila timbul penyimpangan-penyimpangan dapat diambil tindakan untuk dikoreksi sehingga tujuan yang diharapkan tercapai.

### 2. Kebijakan Publik

Sebelum kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan publik, maka terlebih dahulu kita harus membedakan apa itu kebijakan dan apa pula yang disebut dengan kebijaksanaan. Sehubungan dengan pengertian dua hal tersebut diatas, Keban (2004;55) menyatakan pendapat bahwa kebijakan menunjukan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan adalah suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dan lain sebagainya. Dengan melihat perbedaan pengertian tersebut maka diharapkan dalam

pemakaian sehari-hari kedua istilah tersebut harus digunakan secara tepat sesuai dengan konteksnya.

Hal ini juga dikemukakan oleh Syafiie dkk (2005;105) yang menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Disamping itu kebijakan atau *policy* dapat juga kita katakan atau kita pergunakan untuk menunjuk perilaku seorang, aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) ataupun sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut pendapat *Chandler dan Plano* dalam Keban (2004;56) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah. Disamping itu Willy N. Dunn dalam Syafiie, dkk, (2005;107) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh Lembaga atau pejabat pemerintah seperti pertahanan dan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan. Menurut Anderson dalam Islamy (2002: 19) kebijakan Publik adalah Hubungan antar unit-unit Pemerintah dengan lingkungannya.

Selanjutnya Anderson dalam Islamy (2002:19) mengungkapkan bahwa implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah :

- a. Bahwa kebijaksanaan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.



- d. Bahwa kebijaksanaan Negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Bahwa kebijaksanaan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, Lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan.

Dari batasan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan publik adalah pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh legislatif, penataan/pengaturan yang dilakukan eksekutif, penggunaan anggaran negara dan juga kegiatan apapun yang dilakukan oleh siapapun sepanjang diarahkan kepada masyarakat.

### 3. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah menilai pelaksanaan kebijakan sampai sekarang ini dan membuat rekomendasi untuk perbaikan-

perbaikan instrument, design dan implemtasi program-program secara konsisten dan bersifat keseluruhan. Secara umum langkah dalam evaluasi kebijakan yakni :

- a. Mempelajari konsistensi antara program-program dan kegiatan pembangunan dengan kebijakan pembangunan yang dibuat.
- b. Menemukan masalah dengan cara membandingkan kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya
- c. Mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dan pelaporannya.

Selain itu evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sejauh mana tujuan dicapai, maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Untuk teori evaluasi itu sendiri, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang hal tersebut. Siagian dalam bukunya *Filsafat Administrasi* (2003: 141) mengemukakan evaluasi (penilaian) didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata yang dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan.

Seperti yang dikatakan Nurcholis (2005:169), menurutnya evaluasi merupakan suatu proses

yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Jadi evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan (Nugroho, 2003:184).

Hasil evaluasi harus memberikan umpan balik kepada perencanaan, apakah program sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan masalah-masalah apa yang menjadi hambatan selama program berjalan. Umpan balik (*feed back*) merupakan bahan bagi perencana untuk melakukan perencanaan program pembangunan selanjutnya.

Evaluasi merupakan suatu kebijakan publik bagaimana akibat-akibat dari suatu kebijakan apakah akibat-akibat tersebut memang diinginkan dan bagaimana hasilnya, bagaimana dukungan peraturan perundangan dan bagaimana sikap dari kelompok-kelompok yang ada serta dampak yang tidak diinginkan dari evaluasi kebijakan yang dilakukan.

Evaluasi merupakan proses proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai, (Kansil dan Christine, 2003:263}. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai sampai sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Bila ditemukan terdapat kekurangan, akan dilakukan perbaikan-perbaikan

untuk dijadikan bahan perencanaan berikutnya.

Menurut Nugroho (2003) secara umum evaluasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi tersebut telah dilaksanakan ;

- a. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan public yang berlainan.
- b. Mengarah pada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya
- c. Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan
- d. Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia dan kondisi lingkungan strategis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 464 Pekanbaru

### **2. Sumber dan Jenis Data**

- a. Jenis Data



1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terkait, peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional di Kota Pekanbaru
2. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) (Ruslan, 2004: 138). Data ini umumnya berupa bukti, catatan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan) yang diperoleh dari sumber yaitu Kantor Walikota Pekanbaru.

a. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari informan atau orang yang dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat, buku pedoman berisi data-data yang terkait dengan masalah penelitian.

b. Informan

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti memilih para narasumber yang dapat memberikan data mengenai peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyukseskan Pekan

Olahraga Nasional di Kota Pekanbaru XVII Tahun 2012. Informan merupakan keseluruhan dari pada unit analisis yang diteliti dimana karakteristiknya telah diketahui. Informan tentunya dapat memberikan data yang relevan berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini tercantum pada tabel 1.1

Tabel 1.1  
Nama Pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru beserta jabatan

No	Nama Pejabat	Jabatan
1	Ir.Firdaus MT	Walikota Pekanbaru
2	H.Ayat Cahyadi	Wakil Walikota Pekanbaru
3	Syamsurizal	Ketua SUB PB PON XVIII
4	Drs.M. Yusuf, M. Pd	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru

### 3. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005:186). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur, dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan

arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam (Bungin, 2003:67). Materi yang dijadikan sebagai bahan untuk wawancara adalah apa saja program kerja Walikota dan Wakil Walikota dalam Menyukseskan Pelaksanaan PON Ke-18 Tahun 2012, bagaimana pelaksanaannya serta apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program kerja tersebut

Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan terpilih baik pejabat struktural maupun informan diluar pejabat struktural yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan langsung oleh peneliti kepada narasumber atau informan penelitian yang merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012.

Wawancara dengan informan dilakukan melalui wawancara mendalam secara langsung. Informan penelitian ini dipilih berdasarkan penarikan *sample non-probability* yaitu dengan cara *sampling purposive* atau informan yang dipilih adalah aktor/individual yang memiliki banyak informasi dan memahami masalah penelitian (prinsip teknik *sampling non-probability* Malo). (Jhon W. Creswell.2010)

## 2. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki (Marzuki, 2000: 62). Data yang didapat melalui observasi atau pengamatan langsung, terdiri dari perincian tentang kegiatan, perilaku, tindakan secara keseluruhan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data atau arsip yang tersedia pada interview atau perusahaan yang berhubungan dengan penelitian antara lain foto, dan arsip tentang Kantor Walikota Pekanbaru. Dokumen adalah bahan tertulis, film, atau foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan kepentingannya (Moleong, 2005:216).

## e. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan alasan atau gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dengan tabel dan uraian dan dilakukan analisa secara kualitatif, dan seterusnya diambil kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Peran Pemerintah Kota sebagai tuan rumah Dalam Menyukseskan Pekan Olah Raga ( PON ) XVIII Tahun 2012

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau mengharuskan pemerintah kota Pekanbaru untuk bekerja keras

dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan PON ke-18 ini, selain itu fungsi pemerintah kota Pekanbaru sebagai Sub Panitia Besar Kabupaten dan Kota. Maka dari itu berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selaku tuan rumah dalam upaya menyukseskan PON-18 Tahun 2012 di Pekanbaru, diantaranya:

1. Mempersiapkan infrastruktur untuk mensukseskan PON Ke-18
2. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kota Pekanbaru selama berlangsungnya PON Ke-18 salah satunya penertiban Pedagang Kaki Lima
3. Menghimbau perusahaan, toko dan kantor pemerintahan di kota Pekanbaru untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PON ke-18

#### **B. Faktor-faktor penghambat peran pemerintah kota Pekanbaru dalam menyukseskan PON Ke-18 Tahun 2012**

Hambatan-hambatan ini muncul sebagai dampak dari keterbatasan dan ketidakmampuan pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan perannya terhadap menyukseskan Pekan Olahraga Nasional XVIII. Beberapa hambatan tersebut antara lain adalah :

1. Ketersedian Sumber Daya Manusia ( SDM )  
 Dalam menyelenggarakan segala kegiatan untuk

menyukseskan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 tentu saja tidak membutuhkan sumber daya manusia yang sedikit. Hal ini di sesuai dengan adanya surat edaran yang telah dikeluarkan Walikota tentang himbauan pemasangan baliho di instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan serta toko-toko yang ada di Kota Pekanbaru, tetapi masih banyak yang belum melakukan pemasangan baliho-baliho. seharusnya Satuan kerja Perangkat Daerah dan bawahan-bawahannya yang harus menindaklanjuti himbauan walikota tersebut dan segera menindaklanjuti pemasangan baliho PON ini.

Tentunya harus ada dalam hal ini harus ada saling bersinergi baik itu dari pemerintah Kota Pekanbaru maupun dari masyarakat Kota Pekanbaru. Sehingga segala rencana yang telah disusun dan dirancang dapat berjalan dengan yang diharapkan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengidentifikasi permasalahan ini dengan mencantumkan keterbatasan sumber daya manusia dalam telaah staf mereka

2. Partisipasi Masyarakat  
 Tidak Hanya Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tugas untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional XVIII di Kota Pekanbaru tetapi masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional XVIII DI

Kota Pekanbaru. Tanpa masyarakat maka pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak akan terlihat semarak. Tetapi masih banyak masyarakat yang masih kurang peduli dan antusias dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional XVIII

Pekanbaru selama berlangsungnya PON Ke-18 salah satunya penertiban Pedagang Kaki Lima

3. Menghimbau perusahaan, toko dan kantor pemerintahan di kota Pekanbaru untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PON ke-18

## Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah multi event olahraga nasional yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali, dan merupakan titik kulminasi kegiatan keolahragaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional. Dimana terpilih Riau sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional XVIII, dimana Kota Pekanbaru menjadi Ibukota.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau mengharuskan pemerintah kota Pekanbaru untuk bekerja keras dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan PON ke-18 ini, selain itu fungsi pemerintah kota Pekanbaru sebagai Sub Panitia Besar Kabupaten dan Kota. Maka dari itu berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selaku tuan rumah dalam upaya menyukseskan PON-18 Tahun 2012 di Pekanbaru, diantaranya:

1. Mempersiapkan infrastruktur untuk menyukseskan PON Ke-18
2. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kota

Mengingat Pekan Olahraga Nasional merupakan *event* nasional, dimana seluruh komponen baik itu dari pemerintah Kota Pekanbaru beserta staff, panitia Sub PB PON, dan masyarakat harus bisa saling bersinergi sehingga *event* nasional ini dapat berjalan dengan lancar, meriah dan optimal.

### 2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian pembahasan, mengenai peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012. Perlu di perhatikan hal-hal berikut ini:

1. Melakukan sosialisasi kepada instansi atau masyarakat jauh-jauh hari sebelum menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional agar dapat bersama-sama memeriahkan *event* nasional ini. Sehingga munculnya kesadaran partisipasi masyarakat
2. Perlunya peran serta dan dukungan seluruh *stake holder* yang ada untuk optimalisasi program rencana yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam

menyukkseskan Pekan Olahraga Nasional XVIII

3. Ada aturan dan kebijakan atau penetapan terhadap seluruh masyarakat atau instansi pemerintah untuk harus berperan aktif dalam menyukkseskan Pekan Olahraga Nasional XVIII

4. Adanya sanksi-sanksi yang tegas jika tidak mengikuti imbauan dari walikota

5. Mempersiapkan segala hal kebutuhan yang diperlukan dari jauh hari untuk menunjang memeriahkan pegelaran Pekan Olahraga Nasional ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Bungin, 2003, Metode Penelitian Survey, Rineka Cipta, Jakarta

Harmon, Michael M. dan Richard T. Mayer, 2001, Organization Theory for Public Administration, Terjemahan Indra Nugroho, Rineka Cipta, Jakarta

Islamy, M. Irfan, 2002, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara

Kansil, CST dan Christine ST Kansil. 2003, Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara

Keban, Yermias T., 2005, Manajemen Publik dalam Konteks Normatif dan Deskriptif, Fisipol UGM, Yogyakarta

Moleong, Lexy J, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, LP3ES, Jakarta.

Muhadjir, Darwin, 2004, Teori Organisasi Publik, Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta

Nugroho, Riant, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, Elex Media Komputindo

\_\_\_\_\_, 2000, Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta Gramedia

Nurcholis Hanif, 2005, Teori dan Praktek Pembangunan dan Otonomi Daerah, Jakarta, PT. Gramedia Elex Media

Osborne, Davids dan Plastrik, Peter, 2000, Memangkas Birokrasi ; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Jakarta, Lembaga Manajemen PPM

Siagian, Sondang. P., 2000, Patologi Birokrasi ; Analisis, Identifikasi dan Terapinya, Jakarta, Ghala Media

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 2003, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta

Sulistiyan, 2004, Memahami Good Governance ; Dalam Perspektif SDM, Yogyakarta, Gava Media

Syafiie, Inu Kencana. 2005, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung, PT. Refika Aditama

Wahyudi, Kumorotomo, dkk, 2002, Sistem Informasi Manajemen. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah